



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG PERPUSTAKAAN**  
**KOMISI X DPR RI**  
**KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022**  
**TANGGAL 24 S.D. 26 SEPTEMBER 2021**

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Intern Komisi X DPR-RI pada tanggal 18 Agustus 2020 memutuskan untuk melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Kota Surakarta Jawa Tengah, dalam rangka melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan layanan perpustakaan digital di masa pandemi Covid-19.

**A. Dasar Hukum**

- a. UUD NRI Tahun 1945, Pasal 20A ayat (1).
- b. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- d. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- f. UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
- g. UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- h. UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya cetak dan Karya Rekam.
- i. UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (4) huruf f.
- j. Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 59 ayat (5) huruf (f).
- k. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI Tanggal 18 Agustus 2021.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan Komisi X DPR RI ini adalah dalam rangka melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan layanan perpustakaan digital di daerah. Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan data empiris mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah dalam pengelolaan layanan perpustakaan digital di daerah.

**C. Tim Kunjungan Kerja**

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan Komisi X DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. (A-444/F.PKS) dengan didampingi oleh Dra. Ofy Sofiana, M. Hum., selaku Deputi Bidang Pengembangan Bahan

Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI dan Wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

#### **D. Agenda Kunjungan**

Kunjungan kerja dilaksanakan dengan agenda pertemuan sebagai berikut:

1. Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dra. Monika Nur Lastiyani, M.M.
2. Kepala Perpustakaan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani.
3. Kepala Perpustakaan Kabupaten Sleman, Sri Wantini.
4. Kepala Perpustakaan UGM, Nawang Purwanti.
5. Kepala Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, Suparno.
6. Pustakawan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Perpustakaan Komunitas Literasi Gunung Kidul.
8. Komunitas Buku Ahmad Sukron.
9. Pemangku kepentingan perpustakaan DIY lainnya.

## **II. TEMUAN KUNJUNGAN KERJA**

### **1. Implementasi dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.**

- a) Balai Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah telah mengimplementasikan amanat UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi pemustaka, melalui penyelenggaraan perpustakaan meliputi 24 (duapuluh empat) jenis layanan di 3 (tiga) lokasi layanan menetap yaitu Grhatama Pustaka, *Jogja Library Center* di Malioboro, Rumah Belajar Modern di Sewon, Layanan perpustakaan keliling di 18 (delapanbelas) titik lokasi layanan, Paket buku 15 (limabelas) titik lokasi untuk menjangkau pemustaka yang lokasinya jauh dari layanan menetap, 11 (sebelas) titik lokasi Pojok Baca.
- b) Implementasi layanan perpustakaan digital, antara lain:
  - Aplikasi Perpustakaan Digital *IJogja*, berupa aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara gratis untuk meminjam dan membaca buku koleksi digital.
  - Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu *Jogja Library for All*), kerja sama 39 (tiga puluh sembilan) perpustakaan yang meliputi DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta, perpustakaan Kabupaten/Kota, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan khusus.
  - Layanan Koleksi Digital dan aplikasi *Si Yokca*.
- c) Implementasi oleh Perpustakaan Kampus, desa dan lainnya:
  - Perpustakaan yang telah bergabung dengan Sepatu Jolifa sebanyak 28 (dua puluh delapan) Perpustakaan Perguruan Tinggi, 5 (lima) Perpustakaan Kabupaten/kota, 3 (tiga) Perpustakaan Sekolah, 2 (dua) Perpustakaan Khusus.

- Perpustakaan Kabupaten Kota, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Khusus sudah ada yang koleksi digitalnya dapat diakses melalui Ijogja.
- d) DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta selaku instansi pembina telah melaksanakan pembinaan sesuai kewenangannya, antara lain Pembinaan Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Perguruan Tinggi agar perpustakaan yang diselenggarakan sesuai dengan standar. Untuk mendukung implementasi UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, telah ditetapkan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai acuan penyelenggaraan perpustakaan pada perpustakaan sesuai dengan kewenangan agar memenuhi standar nasional perpustakaan.

## 2. Program dan Kegiatan

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta selama pandemi *Covid-19*, antara lain sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Pelaksanaan Selama Pandemi
Layanan perpustakaan secara luring/ <i>onsite</i>	<p>a) Layanan saat pandemi sebelum PPKM darurat dilakukan pada hari Senin-Kamis,Sabtu,Minggu pukul 08.00-15.30 WIB serta hari Jumat pada pukul 09.00-15.30. Setiap pukul 11.30-12.30 layanan tutup untuk dilakukan disinfeksi ruangan. Selama PPKM darurat layanan luring ditutup. Layanan yang dibuka adalah layanan bebas pustaka secara online, layanan akses koleksi buku digital.</p> <p>b) Layanan Pengembalian buku melalui <i>Drive Thru</i>. Pemberlakuan prosedur layanan perpustakaan dengan penerapan protokol kesehatan dan perlengkapan sarana prasarana yang memadai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pengunjung wajib install aplikasi jogjapass untuk pemantauan;</li> <li>- cek suhu saat akan memasuki gedung;</li> <li>- penyediaan tempat cuci tangan di luar ruangan dan <i>hand sanitizer</i> di setiap ruangan;</li> <li>- meminimalisir kontak antar pemustaka dan petugas, antara lain komputer penelusuran dimatikan, OPAC diakses melalui gadget masing-masing pemustaka, pembatas antara petugas dan pemustaka;</li> <li>- pembatasan usia pengunjung;</li> <li>- pembatasan jumlah pengunjung tiap ruangan ;</li> <li>- disinfeksi rutin, saat jam istirahat dan selesai jam layanan.</li> </ul>
Layanan Perpustakaan secara daring/ <i>Online</i>	<p>a) Perpustakaan Digital IJogja;</p> <p>b) Layanan bebas pustaka online, dengan pembayaran melalui transfer dan QRIS (<i>Quick Response Code Indonesia Standard</i>);</p> <p>c) <i>Delivery Order</i> (Pemustaka Istimewa);</p> <p>d) Penelusuran Informasi <i>Online</i>;</p> <p>e) Peminjaman <i>Online</i>;</p> <p>f) Layanan <i>Online</i> melalui <i>WhatsApp</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0881-2658-192: Layanan informasi perpustakaan, Aduan</li> </ul>

	<p>masyarakat, Kunjungan wisata pustaka, <i>Library trip</i>, Layanan foto koleksi secara daring</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0881-2658-193: Keanggotaan Perpustakaan, Sirkulasi Peminjaman &amp; Pengembalian, Notifikasi Keterlambatan, Surat Keterangan Bebas Pustaka</li> <li>- 0851-5882-5030: <i>Delivery Order</i> (Pemustaka Istimewa), Sepatu Jolifa, Perpustakaan Keliling, Paket Buku, Pojok Baca.</li> </ul>
<p>Pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka selama pandemi dilakukan secara daring</p>	<p>a) Webinar Peningkatan Kreativitas, webinar dengan menghadirkan narasumber yang merupakan praktisi di bidang tertentu untuk menyampaikan informasi sesuai keahliannya agar dapat meningkatkan ketrampilan pemustaka, dengan materi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses kreatif produksi film pendek;</li> <li>- Membangun literasi anak melalui mendongeng dan cara membaca efektif;</li> <li>- Memulai bisnis <i>online</i> dan strategi marketing digital untuk meningkatkan penjualan;</li> <li>- Membangun percaya diri dengan public speaking dan personal branding di era digital, dan sebagainya.</li> </ul> <p>b) Telaah Pustaka Budaya Jawa, webinar dengan mengulas berbagai pustaka khususnya tentang budaya Jawa, tema yang dibahas antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengenal lebih dekat budaya lokal masyarakat adat di Pulau Jawa;</li> <li>- Pembentukan karakter budaya literasi baca anak melalui permainan tradisional, dan sebagainya.</li> </ul> <p>c) Bedah Naskah Kuno, yaitu webinar yang membahas tentang berbagai naskah-naskah kuno, tema yang dibahas antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membedah Serat Darmawatisa dan Serat Wedhatama dalam memaknai hidup lebih bermakna;</li> <li>- Membedah serat munasihat jati : tradisi dan kepercayaan Jawa tentang penyakit dan obat abad ke-19;</li> <li>- Tembang bocah dan dongeng wahana rekreasi dan edukasi anak bedah naskah serat lagu bocah-bocah dan serat sadrana;</li> <li>- Bulir-bulir edukasi dalam serat pepeling lan manrayoga, dan sebagainya.</li> </ul> <p>d) Mendongeng Bersama Yokca, rutin dilakukan setiap hari Jumat.</p>
<p>Promosi</p>	<p>a) Dilaksanakan secara daring melalui website &amp; media sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Website <a href="http://balaiyanpus.jogjaprov.go.id">balaiyanpus.jogjaprov.go.id</a></li> <li>- Instagram @balaiyanpus.dpaddiy</li> <li>- Twitter @balaiyanpus_diy</li> <li>- Facebook <a href="http://balaiyanpus.jogjaprov.go.id">balaiyanpus.jogjaprov.go.id</a></li> </ul> <p>b) Promosi melalui media elektronik (videotron)</p>
<p>Evaluasi penyelenggaraan layanan perpustakaan</p>	<p>Pelaksanaan survey SKM 100% online melalui elektronik form, dengan hasil survey untuk tahun 2021 adalah 83,36</p>

Pandemi menyebabkan mobilitas pemustaka terbatas sehingga perlu layanan yang dapat diakses dari rumah. Perpustakaan perlu menyediakan sarana prasarana untuk mendukung berbagai layanan perpustakaan online, penyediaan koleksi digital maupun pengadaan sarana penunjang lainnya. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pengembangan koleksi digital, optimalisasi layanan online, penyelenggaraan berbagai kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, menjadi dilakukan secara online.

3. Program /kegiatan yang telah dilaksanakan adalah seperti tersebut di atas dimana dilakukan transformasi dari layanan langsung/luring menjadi layanan berbasis online/daring. Perubahan/transformatasi layanan tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan/kendala :
  - a) Infrastruktur digital diawal-awal masa pandemi masih belum optimal. Untuk mengatasinya dilakukan *upgrade* sarana prasarana yang digunakan dalam layanan digital meliputi:
    - Komputer untuk operator webinar
    - Camera khusus untuk webinar
    - Langganan aplikasi Zoom Meeting
    - *Upgrade* server untuk berbagai layanan digital
    - Pembuatan aplikasi Si Yokca
    - Upgrade beberapa aplikasi layanan
  - b) SDM TI penunjang layanan belum optimal. Solusi dari permasalahan ini yaitu melakukan training SDM penunjang layanan TI meliputi penggunaan aplikasi Zoom, dan beberapa aplikasi layanan lainnya.
  - c) Sarana akses bagi masyarakat yang terbatas untuk memanfaatkan layanan digital. Bagi beberapa masyarakat untuk mengakses layanan digital mengalami berbagai kendala seperti, keterampilan dan kemampuan dalam menggunakan layanan digital. Untuk mengatasinya maka dilakukan bimbingan pemustaka dengan materi tentang tata cara penggunaan layanan.
4. Peluang, tantangan dan pemanfaatan Informasi teknologi (IT) selama masa pandemi mendukung layanan perpustakaan digital, adalah sebagai berikut:
  - a) Peluang:
    - Eksistensi perpustakaan digital semakin kuat sebagai dampak dari pembatasan interaksi secara langsung (mobilitas) antar petugas & pengguna perpustakaan;
    - Kesempatan berpromosi semakin besar, karena waktu yang dimiliki pengelola perpustakaan lebih besar sebagai dampak dari beberapa kegiatan lain yg terhambat akibat pandemi;
    - Biaya promosi perpustakaan digital menjadi lebih murah, karena dapat menggunakan media sosial yang sifatnya gratis.
  - b) Tantangan:
    - Minimnya kolaborasi antar perpustakaan, karena masing-masing perpustakaan berlomba-lomba membuat/mengadakan aplikasi perpustakaan digital. Sehingga terkesan lebih fokus ke aplikasinya, bukan fokus ke meningkatkan jumlah dan keragaman kontennya;

- Perpustakaan digital iJogja masih belum terintegrasi dengan aplikasi sistem informasi perpustakaan (INLISLITE), sehingga kontennya (ebook) belum optimal ditemukan oleh pemustaka;
  - Konten (ebook) masih perlu ditambah jumlahnya dan jenisnya;
  - Kejenuhan pemustaka terhadap informasi dalam bentuk digital.
- c) Pemanfaatan:
- Perpustakaan secara umum dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari perpustakaan sudah memiliki perpustakaan digital, memanfaatkan media sosial untuk media promosi, dan lainnya.
5. Komitmen pemerintah daerah terhadap pustakawan, dan kemajuan layanan perpustakaan digital, dapat dilihat dari berbagai aspek:
- a) Aspek regulasi. Melalui Perda DIY Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, menjadi dasar kekuatan hukum bagi pustakawan dan penyelenggaraan layanan perpustakaan digital di DIY. Perda ini kemudian akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur yang membahas secara teknis tentang penyelenggaraan perpustakaan digital.
  - b) Aspek SDM. Meningkatkan kompetensi pustakawan melalui berbagai pelatihan baik yang diselenggarakan secara luring maupun daring.
  - c) Aspek Sarana Prasarana. Pengadaan berbagai kebutuhan layanan berbasis teknologi informasi yang meliputi: (1) *Upgrade* perangkat keras, dan (2) *Upgrade* perangkat lunak.
  - d) Kerja sama *stakeholder*. Menjalinkan kerja sama dengan *stakeholder* yang meliputi dengan: (1) Lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi, Sekolah, Madrasah); (2) OPD Pemda DIY; (4) Lembaga Masyarakat; (5) Organisasi Profesi; (6) lainnya.
  - e) Aspek Perencanaan dan Penganggaran. Dalam aspek perencanaan, diprioritaskan pada layanan langsung kepada masyarakat yang menggunakan fasilitasi teknologi informasi.
- Dari aspek penganggaran tidak semua kebutuhan layanan digital dapat dipenuhi karena rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Solusi dari permasalahan ini yaitu mengoptimalkan sumber-sumber yang ada dan berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder*, untuk *sharing* sumber daya yang dimiliki.
6. Upaya membangun perpustakaan Hibrida, sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga pelayanan publik yang mensyaratkan keterbukaan akses bagi setiap warga masyarakat maka selain mengembangkan layanan perpustakaan berbasis digital perpustakaan juga menyediakan layanan yang bersifat langsung. Hal ini penting karena tidak semua masyarakat mempunyai kemampuan untuk mempunyai berbagai fasilitas yang dibutuhkan ketika mengakses layanan digital (misal kepemilikan smartphone/komputer/jaringan internet dll). Sebelum pemberlakuan PPKM darurat, masyarakat secara terbatas dapat mengakses koleksi perpustakaan (buku tercetak) secara langsung selain buku-buku digital dan berbagai layanan berbasis *online*.
7. Usulan dan masukan yang perlu dilakukan pemerintah untuk kemajuan perpustakaan digital:

- a) Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki gedung deposit untuk mengelola koleksi yang diserahkan penerbit maupun pengusaha rekaman sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 12 tahun 2005 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa alternatif tanah/lahan untuk dibangun sebuah gedung deposit yang representatif namun sampai dengan saat ini belum teranggarkan. Aplikasi e-Deposit dari Perpustakaan Nasional RI, bisa digunakan di daerah, sehingga akan dapat menampung konten digital hasil serah simpan KCKR di Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - b) DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mempunyai alokasi anggaran untuk melakukan pembelian naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat, disisi lain ada masyarakat yang memiliki dan menginginkan menjualnya hanya kepada pihak pemerintah.
  - c) Promosi hasil kegiatan literasi, berkaitan dengan tindak lanjut dari kesadaran masyarakat untuk membaca dan mempraktekkan ilmu, pengetahuan yang dimiliki menjadi produk nyata. Apabila memungkinkan pemerintah pusat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak lintas kementerian misal kementerian perindustrian dan perdagangan untuk memfasilitasi perintisan, pengelolaan, pemasaran dan pengembangan produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok/komunitas baca.
8. Diskusi dan pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan dengan para pemangku kepentingan, diringkas sebagai berikut:
- a) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dra. Monika Nur Lastiyani, M.M., menyampaikan beberapa hal, diantaranya bahwa:
    - Perpustakaan Provinsi DIY selalu berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
    - Perpustakaan Provinsi DIY bekerjasama melalui Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All (Jolifa), yaitu kerja sama 39 perpustakaan yang meliputi di DIY.
    - Mengembangkan [www.balayanpus.jogjaprov.go.id](http://www.balayanpus.jogjaprov.go.id) agar pelayanan perpustakaan tidak berhenti meskipun sedang mengalami pandemi.
    - Layanan "lolita" juga dikembangkan sebagai perpanjangan buku secara online, untuk mempermudah pemustaka yang jauh dan sibuk untuk dapat tetap memanfaatkan koleksi perpustakaan.
    - Layanan *drive thru*, juga dikembangkan untuk layanan peminjaman dan pengembalian buku.
    - Dalam hal alih bahasa, juga sedang dilaksanakan penerjemahan naskah-naskah kuno yang berbahasa Arab-Jawa.
  - b) Kepala Perpustakaan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani, antara lain menyampaikan sebagai berikut:
    - Perpustakaan Kota Yogyakarta, sebagaimana 39 perpustakaan lainnya, bekerjasama melalui Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All (Jolifa).
    - Untuk mempermudah pinjam dan pengembalian, Perpustakaan Kota Yogyakarta mengembangkan program layanan *drive thru*. Layanan ini dilengkapi nomor kontak pemustaka dan sebagainya.

- Pojok Digital, juga dikembangkan oleh Perpustakaan Yogyakarta, karena lebih sederhana dan simpel. Dalam pelaksanaannya, cukup menyediakan 3 rak buku, 3 komputer dan, 3 tablet.
  - Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta memiliki lahan yang terbatas, namun sulit mendapatkan DAK, mengingat syarat untuk mendapatkan DAK adalah lahan yang cukup.
- c) Kepala Perpustakaan Kabupaten Sleman, Sri Wantini, menyampaikan beberapa masukan, antara lain:
- Dalam mempertahankan minat baca di masa pandemi, Perpustakaan Kabupaten Sleman mengembangkan media sosial. Beberapa diantaranya adalah dengan membuat format video dalam medsos.
  - Program “Pesbukan” yaitu program Pesan Buku Kami Antar, dilaksanakan untuk melayani pemustaka yang berada di lokasi yang jauh atau sibuk, terutama pada saat pandemi Covid-19.
  - Perpustakaan Kabupaten Sleman pada tahun 2020 masih mendapatkan DAK. Namun untuk tahun 2022 sudah tidak lagi mendapatkan DAK.
- d) Kepala Perpustakaan UGM, Nawang Purwanti., menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut:
- Perpustakaan UGM memang belum membuka layanan untuk umum, namun melakukan kerja sama dengan perpustakaan kampus lainnya, dalam melayani mahasiswa antarkampus.
  - Aplikasi perpustakaan UGM telah dikembangkan untuk mempermudah layanan, karena kampus membatasi jumlah mahasiswa ke kampus karena pandemi.
- e) Kepala Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, Suparno., menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut:
- Perpustakaan Sanata Dharma juga belum melayani masyarakat umum, namun masih terbatas melayani mahasiswa untuk keperluan akademis.
  - Perpustakaan Sanata Dharma melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi lainnya dalam melakukan pelayanan terhadap pemustaka.
- f) Dewi Rahayu, Pengelola Perpustakaan Desa Pengkol Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, menyampaikan antara lain bahwa:
- Perpustakaan milik Kalurahan Pengkol, Kapanewon Nglipar, Gunungkidul belum lama ini berhasil menyabet juara 3 tingkat nasional dengan skor 607. Sedangkan juara 1 dan 2 secara berurutan didapatkan oleh perpustakaan di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Demak, Jawa Tengah.
  - Perpustakaan milik Kalurahan Pengkol, dianggap berhasil menerapkan inovasi di bidang kepastakaan. Salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat lewat berbagai kegiatan, misalnya pelatihan dan pendampingan ke warga, sehingga warga datang ke sini tidak sekedar membaca buku. Peningkatan layanan lainnya adalah pinjam antar ke rumah warga yang memerlukan buku dan lainnya.
  - Mengusulkan agar anggaran Dana Desa yang selama ini “habis” untuk *recovery* Covid-19, dapat mewajibkan penggunaan dananya untuk



perpustakaan. Hal ini penting mengingat perpustakaan desa selalu meningkatkan sdm melalui pelatihan, meupun peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan untuk meningkatkan layanan.

- g) Perwakilan dari Perpustakaan Komunitas GPMB (Gerakan Masyarakat Minat Baca) dari Kabupaten Gunung Kidul, menyampaikan beberapa aktivitasnya gerakan peningkatan literasi dengan organisasi pemuda, karang taruna dll. Juga pembukaan lapak buku, maupun kegiatan virtual. Menggandeng Ibu-ibu PKK untuk melakukan pertemuan literasi. DAK untuk perpustakaan komunitas diperlukan untuk pengembangan layanan perpustakaan. Sampai saat DAK untuk perpustakaan ini masih berada di dinas pendidikan.
- h) Komunitas Buku Ahmad Sukron, mengatakan antara lain bahwa, belum benar-benar ada upaya bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan minat baca, namun masih terpaku pada layanan buku. Jadi masih diperlukan gerakan yang benar-benar membuka mata masyarakat agar mau membaca buku dan meningkatkan literasi.
- i) Dra. Ofy Sofiana, M. Hum., Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan, menyampaikan antara lain:
  - Ketersediaan dan keluasaan lahan masih menjadi syarat bagi turunnya DAK, terutama kedepannya lahan tersebut untuk melengkapi fasilitas umum dan fasilitas fisik yang akan dikembangkan oleh perpustakaan. DAK sangat terbuka bagi perpustakaan yang mengajukannya, sehingga silahkan saja Dinas Perpustakaan mengajukan usulan DAK-nya.
  - Dalam pengembangan SDM pelaku perpustakaan, Perpustakaan RI mengembangkan e-resources. Perpustakaan Perguruan Tinggi juga terbuka bagi pengembangan subjek ilmu yang akan dikembangkan di perpustakaan umum. Kerja sama antar perpustakaan sangat diperlukan.
  - Komunitas *Indonesia Watchers*, juga sangat membantu dalam pengembangan kualitas dan layanan perpustakaan. Kerja sama dengan komunitas ini sangat diperlukan dan terus dikembangkan bagi peningkatan minat baca dan literasi.
- j) Anggota Komisi X DPR RI menanggapi sejumlah pernyataan dari para pemangku kepentingan bidang perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, disampaikan oleh Dr. Abdul Fikri Faqih, MY Esty Wijayati, Sakinah Aljufri, dan Elnino M. Husein Mohi, antara lain mengenai: (1) perlunya anggaran untuk melakukan kampanye membaca buku; (2) perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu yang dimiliki oleh perpustakaan, serta perlunya peningkatan pelayanan.

### III. KESIMPULAN

1. Perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik Perpustakaan Dinas, Perpustakaan Kampus, Perpustakaan Desa, Komunitas, dan lain-lain, telah menerapkan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. Diantaranya melalui: (1) cek suhu saat akan memasuki gedung; (2) penyediaan tempat cuci

tangan di luar ruangan dan *hand sanitizer* di setiap ruangan; (3) disinfeksi rutin, saat jam istirahat dan selesai jam layanan; dan lain-lain.

2. Selama pandemi Covid-19, Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tetap melaksanakan berbagai kegiatan dengan memperhatikan protokol kesehatan, diantaranya webinar tentang peningkatan kreativitas; telaah pustaka Budaya Jawa; bedah Naskah Kuno; dan mendongeng Bersama Yokca. Promosi kegiatan ini dilakukan melalui media sosial.
3. Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam mengembangkan *e-library*, telah mengembangkan beberapa layanan perpustakaan digital, antara lain: (1) aplikasi Perpustakaan Digital *IJogja*, (2) Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All), kerjasama dengan 39 (tiga puluh sembilan) perpustakaan; dan (3) Layanan Koleksi Digital dan aplikasi *Si Yokca*.
4. Beberapa masalah yang dihadapi oleh Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain:
  - a) Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki gedung deposit untuk mengelola koleksi yang diserahkan penerbit maupun pengusaha rekaman.
  - b) DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mempunyai alokasi anggaran untuk melakukan pembelian naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat.
  - c) Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar menjalin kerjasama dengan berbagai pihak lintas kementerian, untuk memfasilitasi rintisan, pengelolaan, pemasaran dan pengembangan produk yang dihasilkan oleh kelompok/ komunitas baca.
5. Perpustakaan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman juga mengembangkan beberapa layanan untuk mendukung literasi membaca pada era pandemi Covid-19, diantaranya pengembangan antar jemput, atau *drive thru* pengembalian dan peminjaman buku. Beberapa usulan yang disampaikan antara lain:
  - a) Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta sulit mendapatkan DAK dari Pemerintah Pusat, karena hanya memiliki lahan yang terbatas. Sedangkan salah satu syarat mendapatkan DAK adalah memiliki lahan yang cukup.
  - b) Dinas Perpustakaan Kabupaten Sleman, pada tahun 2020 masih mendapatkan DAK, namun untuk tahun 2022 sudah tidak lagi mendapatkan DAK.
6. Perpustakaan Desa, Perpustakaan Komunitas dan Komunitas Membaca, antara lain menyampaikan usul sebagai berikut:
  - a) Mengusulkan agar dana desa yang selama ini banyak terserap untuk penanganan Covid-19, dapat dialokasikan untuk Perpustakaan Desa.
  - b) Mendorong gerakan yang benar-benar membuka mata masyarakat agar mau membaca buku dan meningkatkan literasi, bukan hanya terpaku pada peningkatan layanan.

#### **IV. REKOMENDASI**

1. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik Perpustakaan Dinas, Perpustakaan Kampus, Perpustakaan Desa, Komunitas, dan lain-lain, untuk mempertahankan kualitas layanan bagi pemustaka, terutama di era pandemi Covid-19.
2. Komisi X DPR RI mendorong kepada Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkoordinasi dalam pengadaan Gedung Deposit, untuk mengelola koleksi yang diserahkan penerbit maupun pengusaha rekaman.
3. Komisi X DPR RI mendorong kepada Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta maupun Kabupaten Sleman untuk berkoordinasi dalam peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan melalui DAK pada RAPBN 2022 mendatang.

#### **V. PENUTUP**

Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan Komisi X DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 27 September 2021

**Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X  
DPR RI**

**Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.**  
**A-444**